

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

1. Kondisi Geografis



4.1. Gambar Kantor Pemko Tebing

Kantor Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi ada sejak tahun 2009 yang dahulunya bernama Kantor Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2009 s/d 2017 dan beralih Kantor Dinas Sosial di tahun 2017 s/d sekarang tugas dan fungsi dari keduanya sama-sama merupakan Kantor Instansi Pemerintahan yang terdapat di Kota Tebing Tinggi berlokasi di jln. Gn. Lauser, Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Sumatra Utara Kode Pos 20998. Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah wilayah dikarenakan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat yang terdapat di wilayah tersebut.

Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang memiliki kedudukan di bawah tanggung jawab Walikota Perintahan Kota Tebing Tinggi melalui Sekretaris Daerah, yang membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi. Untuk

melihat lebih lanjut mengenai perkembangan dan setiap aktifitas yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dapat di lihat dari beberapa situs online, yaitu sebagai berikut :

Website : dinsos.tebingtinggikota.go.id

Instagram : [dinsostebingtinggi](https://www.instagram.com/dinsostebingtinggi)

Facebook : [DinSos Tebing Tinggi](https://www.facebook.com/DinSosTebingTinggi)

No WA : 0812 6013 6081

2. Kondisi Demografis

Letak Geografi Kantor Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

Alamat: Jalan Gunung Leuser, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.

Kantor Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi terletak di Lingkungan Perkantoran BP7 Kota Tebing Tinggi

Bersebelahan dengan SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi di sebelah selatan



4.2. Gambar Lokasi Kantor Dinsos Kota Tebing Tinggi

Laboratorium terpadu Kota Tebing Tinggi di sebelah Utara Perumahan Griya Prima (BP7) di sebelah Timur dan Pondok 2 PTPN III di sebelah Barat.

3. Moto Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

**“BERKERJA BERSAMA HATI, MEWUJUDKAN MASYARAKAT
SEJAHTERA”**

4. Sejarah Kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum berdiri perkampungan, wilayahnya termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Padang, yang berada di bawah Kerajaan Deli. Pernyataan resmi para tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa daerah Tebing Tinggi sudah dijadikan pemukiman sejak tahun 1864. Saat itu, seorang bangsawan dari Bandar Simalungun yang bernama Datuk Bandar Kajum pergi meninggalkan kampung halamannya. Bersama para penggawa dan inang pengasuhnya, melalui Kerajaan Padang mereka menyusuri sungai untuk mencari hunian baru. Mereka kemudian bermukim di Tanjung Marulak, sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Rambutan. Namun, kehidupan Datuk Bandar Kajum belum juga tentram. Palsunya, ia terus diburu oleh tentara Kerajaan Raya. Karena itu, Datuk Bandar Kajum memindahkan pemukimannya. Bersama pengikutnya, ia lantas mendirikan hunian di atas tebing yang tinggi. Pemukiman itu sekarang berlokasi di Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Padang Hilir. Di tempat itu juga terdapat makam keturunan Datuk Bandar Kajum, yang kemudian diyakini sebagai cikal bakal nama Tebing Tinggi. Periode Kerajaan Padang Cikal bakal Kota Tebing Tinggi tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Padang. Cerita berawal pada 1607, saat Sultan Iskandar Muda dari Aceh mengirim banyak pembesar kerajaan ke berbagai wilayah Sumatera.

Salah satunya adalah Umar, yang mendarat di Bandar Khalifah dan berhasil menguasai wilayahnya. Selanjutnya, Umar memperluas kekuasaannya hingga ke pedalaman Hulu Raya dan sampai di wilayah Bajenis (sekarang Kota Tebing Tinggi). Di tempat itulah, Umar membangun kekuasaannya dengan gelar Baginda Saleh Qamar pada 1630. Peristiwa inilah yang menjadi awal berdirinya Kerajaan Padang dan awal mula pemerintahan di wilayah Tebing Tinggi. Lahirnya Kota Tebing Tinggi Pada 1887 pemerintah Hindia Belanda menetapkan Tebing Tinggi sebagai kota pemerintahan dan di dekatnya dibangun perkebunan besar. Selanjutnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Tebing Tinggi sebagai daerah otonom dengan sistim desentralisasi. Untuk melaksanakan

pemerintahan, dibentuk Dewan Kota bernama Gementeeraad, yang beranggotakan sembilan orang. Dari sembilan orang tersebut, lima di antaranya adalah orang Eropa, tiga orang Bumiputera, dan satu orang Timur Asing. Kemudian pada 1 Juli 1917, Kota Tebing Tinggi resmi berdiri. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Jadi Kota Tebing Tinggi. Kerajaan Padang masa itu dihuni penduduk dari multi etnis, baik etnis lokal maupun dari mancanegara. Hingga kini bukti-bukti multi etnisitas itu terlihat dari penamaan kampung-kampung yang ada di Kota Tebing Tinggi., seperti, Kampung Jawa, Kampung Begelen, Kampung Rao, Kampung Mandailing, Kampung Tempel, Kampung Batak dan Kampung Keling. Penamaan kampung yang terakhir ini berlokasi di pinggiran sungai Padang saat ini terletak di Kelurahan Tanjung Marulak menginformasikan bahwa pada masa Kerajaan Padang wilayah itu sudah di huni salah satu suku bangsa dari anak benua India. Bukti arkeologis keberadaan etnis anak benua India itu dengan pernah ditemukannya bangkai sebuah perahu bergaya Hindu mengendap dari kedalaman sungai Padang di Desa Kuta Baru.

Namun sayang, bangkai kapal itu hancur karena tidak terawat. Demikian pula dengan keberadaan etnis Tionghoa telah ada seiring dengan perkembangan hubungan Kerajaan Padang dengan kerajaan lain. Etnis Tionghoa kala itu, banyak menghuni pinggiran muara sungai Bahilang. Kelompok mereka dipimpin seorang kapitan. “Hingga kini kalau saya tidak salah kediaman kapitan Cina iu masih ada di Jalan Iskandar Muda berhadapan dengan bekas bioskop Metro,” tegas orang tua yang enggan di panggil kakek itu. Di samping kedua etnis ini, orang-orang Belanda juga belakangan menghuni Kerajaan Padang . Ini dibuktikan dengan adanya perkuburan mereka yang disebut Kerkof (kuburan) di Kampung Bagelen –sekarang di Jalan Cemara. Beberapa kampung yang spesifik dari kegiatan penduduk kala itu juga masih terabadikan hingga kini, misalnya Kampung Bicara, Bandar Sono, Kampung Persiakan, Kampung Durian, Kampung Jati, Kampung Sawo, Kampung Kurnia, Kampung Jeruk, Kampung Semut, Kampung Tambangan, Kampung Sigiling dan Kampung Badak Bejuang serta beberapa kampung lainnya Kot

Tebing Tinggi saat ini terdapat 5 Kecamatan dan Kelurahan 34 yang di perhatikasn oleh Dinas Sosial untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Desa/Kelurahan
12.76.01	Padang Hulu	7	Kelurahan	Bandar Sono, Lubuk Baru, Lubuk Raya, Pabatu, Padang Merbau, Persiakan, Tualang.
12.76.02	Rambutan	7	Kelurahan	Karya Jaya, Lalang, Mekar Sentosa, Rantau Laban, Sri Padang, Tanjung Marulak Hilir
12.76.03	Padang Hilir	7	Kelurahan	Damar Sari, Deblot Sundoro, Satria, Tambangan, Tambangan Hulu, Tebing Tinggi
12.76.04	Bajenis	7	Kelurahan	Kelurahan Bandar Sakti, Brohol, Bulian, Durian, Pelita, Pinang Mancung, Teluk Karang
12.76.05	Tebing Tinggi Kota	7	Kelurahan	Badak Berjuang, Bandar Utama, Mandailing, Pasar Baru, Pasar Gambir, Rambung, Tebing Tinggi Lama
12.76.04	Bajenis	7	Kelurahan	Kelurahan Bandar Sakti, Brohol, Bulian, Durian, Pelita, Pinang Mancung, Teluk Karang
	TOTAL	35		

5. Visi Misi Kota Tebing Tinggi

a. Visi

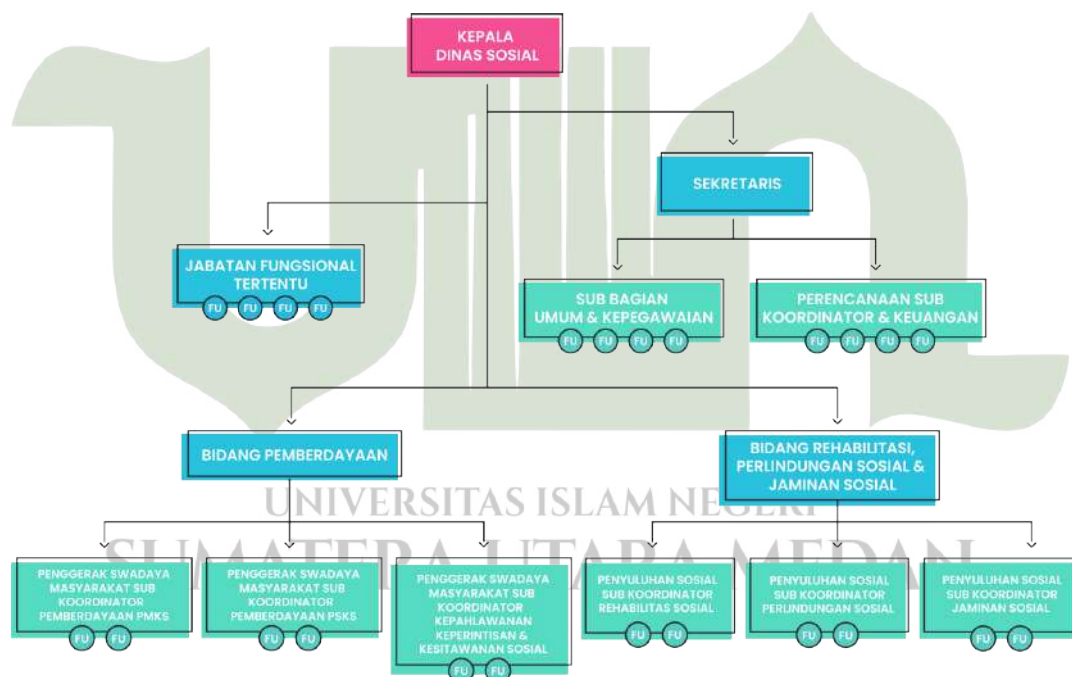
Visi Kantor Dinas Sosial melayani Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa, perdagangan yang cerdas, layak mandiri dan sejahtera dengan sumberdaya manusia yang beriman dan berkualitas.

b. Misi

Mewujudkan Tata kelola Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang baik

- Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan wilayah dan perdagangan
- Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan
-

6. Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial



Keterangan :

Drs. Khairil Anwar, M.Si	: Kepala Dinas Sosial
Tigahara Hasibuan, SE	: Sekretaris
Fiyen Zulfitri, SE	: Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
Anita Luciana Napitu, SE	: Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan

Yahya Hakim Damanik	: Pengadmidrasi Keuangan
Mizwar	: Analis Keuangan
Dipa Umar Sagala, SE	: Pengadmidrasi Umum
Jelita Pasaribu, SH	: K.B Rehabilitas, Perlindungan Jaminan Sosial
Pirman Sinurat, SSi	: Penggerak Swadaya Masyarakat
Atun Rahayu Ningsih	: Pengadminitrasi Umum
Buchori Qosyim	: Pengadministrasi, Perencanaan, dan Program
Dwi Prasetya, SH	: Penggerak Swadaya Masyarakat
Sari Nalurita, SE	: Penggerak Swadaya Masyarakat
Agustiningih	: Penyuluhan Sosial
Fatmawaty	: Penyuluhan Sosial Seksi Jaminan Sosial
Wannahari	: Penyuluhan Sosial Sub Perlindungan Sosial
Eviana Sulesti Silaen, S.Psi	: Penyuluh Sosial
Lilik Hamdani	: Pengelola Rehabilitasi Sosial
Marianti Sinaga, S.Sos	: Pekerja Sosial
Yaumil Habibi, S.Psi	: Pekerja Sosial
Henni Kristian Siboro S.Sos	: Pekerja Sosial
Mei Rinda Agnesta Mrg S.Sos	: Pekerja Sosial
Mutia Hafizah Ulfa Sitorus, S.S	: Pekerja Sosial

7. Visi Misi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

a. Visi

Mewujudkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan segala potensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Penanganan PMKS secara terpadu dan sistematis
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan masyarakat melalui kerjasama

8. Tugas Dan Fungsi

a. Kantor Dinas Sosial

Adapun pelaksanaan tugas Dinas Sosial membuat penyelenggaraan fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perumuskan kebijakan teknis bidang sosial.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- 4) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- 5) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksanaan teknis (UPT) dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

b. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial yang sering disebut dengan Kadis Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Kadis mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sekretariat Dinsos

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang pengelolaan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja dibidang kesekretariatan.
- 2) Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan.
- 3) Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan pelayanan administratif.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Sekretariat, membawahkan:
- 7) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 8) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

d. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam hal :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial
- 2) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- 3) Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

e. Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Fungsi Dinas Sosial di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial
- 2) Seksi Perlindungan Sosial
- 3) Seksi Jaminan Sosial

f. Mitra kerja Dinas Sosial

Mitra kerja sangat dibutuhkan mengingat Kota Tebing Tinggi membutuhkan perhatian sehingga Dinas Sosial membangun kerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra, saling menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan (mutualisme). Adapun mitra kerja yang terjalin dengan baik yaitu sebagai berikut :

1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

2) Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam

melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan. Kekhasan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

3) Tagana

Tagana adalah suatu organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasiskan masyarakat. Pembentukan Tagana merupakan suatu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan generasi muda dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, khususnya yang berbasis masyarakat. Keberadaan Tagana selama sekitar empat tahun ini telah banyak melakukan kegiatan kemanusiaan dalam bencana dan kegiatan kesejahteraan sosial yang akhirnya menjadi salah satu organisasi yang diterima oleh masyarakat. Selain itu hampir semua anggota Tagana telah mengikuti pelatihan di bidang penanggulangan bencana dan bidang kesejahteraan sosial sehingga menyebabkannya mampu melaksanakan aneka peranan di bidang penanggulangan bencana. Sebagai suatu organisasi, Tagana mampu mengembangkan program dan kegiatannya secara berkelanjutan.

4) Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

5) Bekerja Sosial Masyarakat

PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

B. Hasil Temuan Penelitian

1. Strategi Komunikasi Dinas Sosial

a. Penyuluhan Bantuan Sosial

Dalam sebuah instansi khususnya di lingkup pemerintahan komunikasi yang baik tentunya dapat menghantarkan kepada keberberhasil dalam mencapai suatu tujuan untuk mencapai sebuah tujuan, yang pada saat ini tujuan tersebut ingin setiap bantuan baik berupa Dana dan Bahan Makanan Pokok dapat tersalurkan dengan baik perlu adanya sebuah strategi komunikasi yang jelas dari proses pengambilan keputusan oleh Ketua Bidang Penanggung Jawab penyaluran Bantuan tersebut. Humas pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu bagian yang mengemban fungsi sebagai pelaku dalam membangun citra positif sekaligus sebagai Informan yang harus dapat Cepat dan Tanggap dalam merespon serta menanggapi apa yang di butuhkan oleh Instansi Pemerintahan dan masyarakat. Citra positif bagi Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sangatlah penting karena dengan citra positif akan lebih didukung oleh berbagai pihak yang menentukan keberhasilan Pemerintahan dalam menuju tujuan yang ingin diinginkan. Humas perlu menyadari pentingnya citra bagi sebuah pemerintah karena dengan citra dapat berpengaruh positif bagi pemerintah yang dinilai oleh masyarakat dan publik.

Tujuan utama dari program bantuan sosial ini adalah untuk mengetahui serta melihat bagaimana kesesuaian antara hasil manifestasi dari program dengan tujuan yang telah dialokasikan sebelum nya. Dalam hal ini maka penulis ingin mengetahui tujuan dari program bantuan sosial ini sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya program ini diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pada hasil penelitian ini menjelaskan tentang Strategi Humas Perintah dalam Pengalokasian Bantuan Sosial Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada Efektivitas Pembagian Bantuan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat Miskin, Pendistribusian Bantuan Sosial :

SUMBER DATA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAHAN DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL



DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL MENJADI DASAR
ACUAN DALAM MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERLU DIKELOLA DENGAN BAIK,
AKUNTABEL, DAN BERKELANJUTAN

b. Efektivitas Pembagian Bantuan Sosial

Efektivitas Pembagian Bansos membutuhkan komunikasi yang baik di mana komunikator merupakan orang atau pihak yang bertindak sebagai pengirim dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber pesan dalam sebuah proses komunikasi dalam memberikan tanggapan serta menjawab pertanyaan yang di ajukan. Komunikasi yang di maksud adalah pihak menjelaskan proses strategi komunikasi yang di mana komunikatornya merupakan petugas layanan, sebagai mana yang di sampaikan oleh Bapak Desmon Simanjuntak, S.p sebagai Petana Humas Muda Kota Tebing Tinggi.

“Strategi Humas pemerintah yang saat ini dapat kami informasikan yaitu, bahwa Humas sendiri merupakan wadah untuk menaikkan citra positif bagi setiap instansi selain tugas lainnya memberikan informasinya kepada humas untuk di informasikan lagi ke pada publik melalui media cetak seperti spanduk, baleho serta sosialisasi dan majala yang akan terbit setiap satu bulan sekali dan beberapa media online sesuai dengan juknis yang di berikan. Dalam artian kami bekerja

sesuai dengan apa yang di minta oleh instansi lain, Humas berperan memerikan informasi.

Dinas Sosial sudah melakukan berbagai strategi pelayanan publik agar masyarakat nyaman baik dari upaya prosedur yang telah di tetapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kemudahan dalam mendapatkan layanan. Layanan yang di berikan ini terus berlanjut agar Kantor Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi mendapat respons yang sangat baik sehingga masyarakat tidak merasa ragu ketika datang menyampaikan keluhan dan tidak merasa adanya sebuah permainan politik yang mengakibatkan masyarakat merasakan ketidak nyamanan atas pelayanan yang di lakukan oleh pemerintah kota. Membangun sebuah hubungan kepercayaan dapat menarik minat sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Desmon Simanjuntak, S.p sebagai Petana Humas Muda Kota Tebing Tinggi, yaitu:

Hubungan humas pemerintah dan Penyaluran Bantuan sosial yang lakukan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yaitu Humas dapat memberikan dampak berupa menaikkan citra dan menjaga hubungan baik serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat di mana pihak pemerintah tidak melakukan penyimpangan dalam pemberian bantuan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait informasi kapan dan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan yang sepantasnya di dapat oleh warga, ada humas yang fungsi dan tugasnya memberikan informasi masyarakat bisa lebih tau mengenai perkembangan terkait bantuan, dan dapat di akses di Tebing Tinggi Siaga 112 tersebut dapat diakses masyarakat secara gratis, "Hal ini bertujuan supaya mempermudah masyarakat di dalam melakukan pengaduan kondisi kegawat darurat yang sedang terjadi,"

Dalam melaksanakan strategi dalam penyaluran bantuan tentunya terdapat kendala-kendala, sebagaimana yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Bapak Drs. Khairil Anwar, M.Si :

"Kendala itu pasti ada di mana masyarakat datang marah-marah disebabkan tidak terdaftarnya sebagai penerima bantuan, marah di sebabkan kecewa karena di nyatakan dapat namun ketika di tunggu tidak dapat bantuan yang di janjikan. Kami selaku pengurus tidak dapat berbuat banyak selain mengusahakan dan bersikap tenang untuk dapat menetralsir keadaan, Sebagai orang yang di percaya sebaiknya kita memaklumi setiap keluhan yang masyarakat sampaikan. Karena

itu menjadi acuan kita untuk dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya, begitu lah saya dalam menanggapi masyarakat harus dengan ketengan dan senyum bukan untuk mengejek melainkan untuk menenangkan hati saya sendiri sebelum menenangkan orang lain.”

Komunikasi yang baik itu menjadi pengacu keberhasilan dalam menerapkan Strategi Kepemerintahan dimana komunikatornya petugas layanan, sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Drs Khairil Anwar M.si

“Berkomunikasi yang baik menerima masyarakat dengan terbuka dan membicarakan permasalahan dengan tatap muka merupakan salah satu cara agar dapat menemukan titik terang dari masalah tersebut. Saya tekankan kepada staf kantor untuk dapat melayani dengan baik, ramah dan sopan kepada siapa saja yang datang guna mendapat respon baik dari masyarakat, tugas kita untuk memecahkan maslah bukan menambah permasalahan.”

Pemantauan program adalah kegiatan yang di lakukan dalam penyaluran bantuan sosial pemantauan ini dilakukan dengan maksud untuk mengawal juga mengamati bagaimana terhadap pembagian bansos yang disalurkan pada warga yang membutuhkan sudah direalisasikan dan diterima secara baik oleh warga masyarakat yang membutuhkan dan yang wajib menerima, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada agar bisa ditindak sedemikian cepat. Di Kota Tebing Tinggi. mengenai pemantauan terhadap bantuan sosial sudah terealisasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat yang bersangkutan tanpa ada pungli maupun hal pungutan lain. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga sudah menghimbau kepada masyarakat ketika mendapat permasalahan untuk dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan di Kelurahan tempat tinggal dan pihak Dinas Sosial seperti masyarakat yang berhalangan hadir pada saat pencairan bantuan sosial agar dapat di wakikan dan tidak ada nya pembekuan dana dari pihak di atas. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam hal memonitoring penanganan Bansos *“yang memonitoring selain kepala kelurahan, P2k2, DTKS, semacam pepanjangan tangan kelurahan yang duduk di Kabupaten”* ujar nya. Bg Ilmi Habibi Damanik.

Sementara itu Abang Dipa Umar Sagala, SE menambahkan *“untuk proses pencairan dananya adalah pencairan dibagi secara transparan atau transfer, dan ada yang dari kantor pos karna banyak nya dana yang harus di bagi pemerintah*

membuat berbagai metode karena terdapat hambatan berupa penumpukan data sehingga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan di buangkan buku tabungan namun di bagi ada yang ke bank dan ke kantor pos terdekat”.

Di Kota Tebing Tinggi perealisasiian bantuan sosial sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan efektif karena masyarakat dapat menikmati secara utuh dari bantuan tersebut tanpa adanya potongan apapun. Untuk mengamati seberapa efektif dari pelaksanaan penyaluran bansos di tengah keadaan pemulihan paska covid 19 tepat pada 2 tahun lalu yang pada saat ini keberadaanya terus mengalami naik turun di setiap wilayah Indonesia termasuk Kota Tebing Tinggi. Di himbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan serta patuh pada ketetapan perintah, saat ini proses dari penyaluran bansos masih berjalan di ukur menggunakan 4 indikator menurut Budiani yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan program, (Amelia, 2015) dijelaskan berikut ini. Ketepatan sasaran dari suatu program bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah adalah sejauh mana ketepatan bantuan yang didapat oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi pada saat ini. Dalam menganalisis mengenai ketepatan sasaran program indikatornya yaitu ditujukan untuk masyarakat. Masyarakat yang menjadi target utama dalam bantuan ini adalah masyarakat yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat serta keluarga yang tidak mendapat bantuan apapun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teks putusan eksekutif jendral fakir dan miskin perihal arahan khusus manifestasi Bansos yang masih ada pada keadaan saat ini. Di Kota Tebing Tinggi mengenai ketepatan sasaran program bantuan sosial tunai sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Namun dari data tersebut masih tumpang tindih untuk siapa saja yang menerima dan apakah program tersebut telah tepat sasaran.

“Bantuan sosial ini tidak sesuai harapan masyarakat, karena masyarakat maunya kan semuanya dibagi rata, semua mau dapat, sementara dalam penyaluran Bansos itu ada aturan dan ketentuan jadi kalau harapan masyarakat itu pasti tidak sesuai, karna keinginan masyarakat tersebut belum tentu sesuai dengan peraturan. Tapi kalau ditanya tepat sasarnya, tentu aja udah, karna kami kan ada data penerima bantuan, supaya penerima Bansos ini bisa tepat sasaran. Kami selaku

perpanjang tangan pemerintah berusaha untuk memastikan jika Bantuan di dapatkan oleh warga yang membutuhkan. Dengan adanya tim surver lapangan yang di bantu kelurahan di mana jika ada masyarakat yang mendapat bantuan namun di katagorikan Mampu maka akan di gantikan oleh warga lain yang membutuhkan.” tutur Drs. Khairil Anwar M.Si, Kadis

Mekanisme penyaluran bantuan sosial telah dirancang sedemikian rupa, bukan berarti tidak ada kemungkinan kebocoran kembali terjadi. Dalam program pemberian bantuan tunai, misalnya, tidak semua penerima bansos tunai memiliki rekening bank sehingga masih harus disalurkan melalui pihak ketiga semisal RT, RW, atau 34 Kelurahan serta pihak Dinas Sosial. Pada titik ini, bukan tidak mungkin terjadi praktik-praktik curang yang merugikan masyarakat. Untuk mekanisme bantuan yang diberikan di Kota Tebing Tinggi agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, Drs Khairil Anwar M.si bersama dengan perangkat Kantor Dinas Sosial serta Perangkat Kelurahan yang lain sudah melakukan musyawarah khusus. *“Kami sudah melakukan musyawarah khusus dan merujuk pada peraturan peraturan pemerintah, jadi tidak sembarangan asal kasi bantuan kepada masyarakat.”* Ujar Bg Dipa Umar Sagala, SE Sebagai Pengadminitasi Umum.

“Dari segi hukum, sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota tebing Tinggi Sesuai Dengan Surat Keputusan Mentri Sosial RI Nomer 52/HUK/2022 Tanggal 04 April 2022 sebanyak 28.598 Kepala Keluarga atau 90.615 Jiwa “ Sambung Bg Dipa Umar Saga SE. Sebagai Pengadminitasi Umum

Dalam pengawasan pemanfaatan dan penyaluran bansos tentu sudah seharusnya dilakukan. Meski demikian, untuk lebih menjamin agar pengawasan bansos benar-benar berjalan transparan, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah pelibatan partisipasi publik. Sebagai subjek utama dan pihak yang memahami dinamika di lapangan, masyarakat akan dapat menjadi efektif. Tinggal bagaimana pemerintah membuka saluran keluhan dan bersedia mendengar berbagai masukan masyarakat tentang kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Program yang sifatnya *top-down* dan tidak mengedepankan pengawasan secara *bottom-up* niscaya akan rawan gagal (Crescenzi and RodriguezPose, 2011)

a. Pendistribusian Bantuan Sosial

Pandemi Covid 19 banyak menekan keuangan perekonomian masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, tanpa memandang masyarakat kota maupun masyarakat desa. Ada berbagai macam jenis bantuan sosial yang disalurkan presiden untuk meringankan beban masyarakat. Seperti bantuan paket sembako (beras, gula, minyak goreng, telur), Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi warga tidak mampu, listrik gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19, Kartu Prakerja diperuntukkan untuk masyarakat yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama empat bulan, subsidi gaji karyawan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pandemi pada saat ini sudah mulai meredah namun bantuan masih terus disalurkan dikarenakan untuk terus membangun perekonomian masyarakat yang mulai membaik, Pemerintah Kota Tebing Tinggi berusaha menjamin bantuan agar dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Meski pun beberapa bantuan yang pernah ada pada saat pandemi covid 19 di hentikan dan di alihkan kembali kepada PKH, BDT, BPNT yang tugas serta fungsinya sama, namun bedanya hanya pada golongan di atas berlaku untuk masyarakat yang membutuhkan dan tidak lagi diperuntukan bagi semua masyarakat di sebabkan sudah menurunnya paparan pandemi covid 19.

b. Jumlah keseluruhan masyarakat yang mendapat bantuan KPM

Keluarga penerima manfaat pada tahun 2021 bekisar 11.051 Jiwa bantuan yang di berikan kepada masyarakat di harapkan mampu di manfaatkan dengan sebaik mungkin, di mana masyarakat dapat menerima bantuan tersebut tiga kali dalam setahun atau yang di sebut dengan (Triwulan) dengan jumlah yang tertera.

Tabel 4.2. Jumlah keseluruhan masyarakat yang mendapat bantuan KPM

No	Nama Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Bajenis	2655 Jiwa

2.	Padang Hilir	2323 Jiwa
3.	Padang Hulu	1928 Jiwa
4.	Rambutan	2663 Jiwa
5.	Tebing Tinggi Kota	1.408 Jiwa

Pada tahun 2022 tepat pada bulan Januari – Mei 2022 terdapat 10.981 Penerima KPM dan sedang berjalan di bulan berikutnya. Sejumlah sarana penyaluran dana baik dari Bank ataupun Kantor Pos semua dalam pengawasan kedinasan, yang bertanggung jawab penuh mengawal dan memastikan masyarakat menerima bantuan yang di salurkan. Ketika ada masyarakat yang tidak mengambil bantuan tersebut maka dinyatakan tidak membutuhkan atau sudah meninggal, dan akan di proses lebih lanjut jika yang bersangkutan berkenan melaporkan kepada pihak di arahkan.

Terkait permasalahan yang terjadi dimasyarakat kurang nya pengetahuan sehingga tidak mengetahui permasalahan ketika bantuan tidak dapat padahal sudah terdata di DTKS. Masalah tersebut sebagai berikut :

- a) Terjadinya kerusakan pada No NIK di Kartu Keluarga
- b) Kartu keluarga tidak online
- c) Ada nya kesalahan nama di salah satu nama keluarga, karena jika salah satu baik nama, no nik maka kan di nyatkan rusak atau tidak dapat terbaca sehingga penyaluran bantuan tidak dapat tersalurkan (tertunda)
- d) Kurangnya informasi dalam pengambilan dana selama kurang lebih 3 bulan lamanya maka akan ditarik kembali oleh penyalur dana (dibekukan).

2. Dampak Pengalokasian Bantuan Sosial

a. Layanan Publik Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi berupaya melayani masyarakat dengan cepat dan tanggap serta dapat memberikan informasi yang jelas dengan sikap sopan dan ramah dalam membantu masyarakat. Proses pelayanan di harapkan dapat mejadikan Dinas Sosial sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang di inginkan dengan jelas dan tepat, seperti persyaratan, prosedur,

waktu yang di perlukan dalam pelayanan dan lain lain. Adapun pelayanan yang dapat di berikan kepada masyarkat sebagai berikut :

a) Melayani Dengan Cepat

Memberikan pelayanan serta menanggapi masyarakat merupakan keharusan yang harus dilakukan, mengingat kantor Dinas Sosial merupakan kantor yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dimana bantuan sosial berpusat di kantor Dinas Sosial. Peneliti melihat setiap petugas melakukan tugas dengan cekatan setiap masyarakat yang datang meminta bantuan langsung di beri pelayanan yang efektif, semua sarana dan prasarana di terapkan dengan harapan masyarakat dapat merasa di hargai oleh petugas. *“Kantor tidak pernah sepi oleh kehadiran masyarakat ada saja yang datang dengan meminta bantuan berupa tanda tangan, arahan agar bantuan dapat di urus, ada yang bermasalah dengan keungan. Semua kami terima dan musyawahkan terlebih dulu sebelum memberikan keputusan, agar masyarakat beserta kami para pekerja tidak mengalami hal yang tidak di inginkan di kedepannya kalau asal memberikan tanggapan”*. Ujar Kak khadijah lubis senagai salah satu staf Kantor Dinas Sosial.

Berdasarkan pendapat di atas di perkuat dengan kegiatan obervasi penelitian yang sedang berlangsung, kecekatan dalam proses pelayanan ini diperlukan agar masyarakat tidak lama menunggu dan tidak terjadi perkumpulan terlalu banyak, karna itu dapat memnganggu keefektipan dalam proses bekerja di Kantor Dinas Sosial.

b) Bahasa yang sopan

Dinas Sosial merupakan salah satu tempat pelayanan untuk masyarakat sehingga bahasa yang sopan dan santun merupakan keharusahan yang di miliki oleh setiap pekerja, Bahasa yang sopan merupakan cerminan bahwa Dinas Sosial membuka diri dengan baik terhadap apa saja yang akan masyarakat sampaikan kepada pegawai yang di tuju. Kesopanan yang diberikan dapat membuat masyarakat senang dan tidak merasa canggung ketika sedang berhadapan, orang yang ramah memiliki sifat tanggap terhadap keperluan orang lain.

Dengan demikian, komunikasi beradab, pada prinsipnya, merupakan suatu proses untuk mengomunikasi kebenaran dan membangun

hubungan sosial dengan komunikannya. Sebab, miskomunikasi hanya akan menjadikan berplingnya komunikan, yang berarti hilang pula informasi kebenaran itu. Inilah yang ditegaskan oleh al-Qur'an :

“sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”

Ayat Al Imran 159 ini secara khusus ditujukan Rasulullah s.a.w, namun, secara umum, adalah dimaksud untuk mendidik umatnya, bagaimana cara menyikapi orang yang menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya sebagai upaya untuk membangun sebuah komunikasi yang baik itu, yaitu dengan bersikap lembut dan santun, serta bertutur kata yang baik

Berdasarkan hasil pengamatan obsevasi peneliti menunjukkan bahwa petugas pelayanan sudah memberikan keramahan kepada masyarakat yang datang berkunjung, sikap yang ceria dan saling bertukar lelucon membuat sebagian masyarkat senang.

“Dan semua candaan yang di lakukan oleh kami ini dek, merupakan cara kami untuk melepas rasa penat karena tugas yang tidak hanya satu mejadikan kami cepat bosan, jenuh dan malas. Sehingga dengan cara yang seperti dek lihat merupakan cara untuk membahagiakan diri sebelum adanya laporan baik dari masyarakat atau atasan datang”.

Banyak petugas melampiaskan emosi kepada masyarakat dan ada yang lari ketika masyarakat datang kentor instansi pemerintah, namun tidak peneliti temui ketika sedang melakukan observasi. Dinas Sosial memberikan pelayanan yang sangat baik tatak ramah murah senyum membuat siapa saja tidak ingin meninggalkan kantor dengan cepat. Terdapat beberapa pelayan kantor yang enggan menyapa dan menanyai *“ingin menemui siapa dan ada keperluan apa”* sehingga masyarakat sesekali masih terdapat yang menunggu lama.

c) Keluhan di respon petugas

Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi tidak pernah menolak warganya untuk datang menyampaikan keluh kesah kepada staf yang bersangkutan, namun tidak semua staf dapat melayani setiap keluhan yang di berikan disebabkan ada tugas lain yang harus di kerjakan. Sehingga di butuhkan media

komunikasi tambahan yang di harapkan dapat lebih banyak merespon keluhan masyarakat 24 jam, dan akan di respom oleh staf khusus.

“Selain menerima keluhan masyarakat secara langsung Dinas Sosial juga mempunyai akun pengaduan untuk masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses dalam menyampaikan keluhannya kepada Dinas” Ujar Bapak Drs. Khairil Anwar M.Si

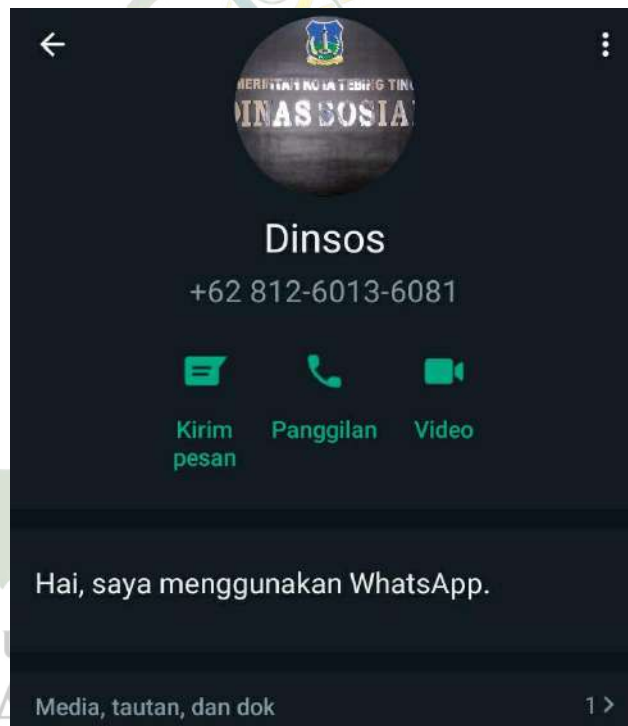
Tambahan dari Ibu Fiye Zulfitri SE. “Layanan pengaduan terdapat di websait dinsos.tebingtinggikota.go.id, facebook, dan layanan 112 dari kehumasan Pemko Tebing Tinggi (Koinfo) whatsapp masing-masing agar lebih banyak menampung keluhan masyarakat dan agar lebih efektif menyelesaikan permasalahan di masyarakat untuk kedepannya”.

Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti selama melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, pelayanan yang di berikan sangat maksimal melibatkan banyak pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan adanya sistem komunikasi yang baik dan di dukung strategi pemerintah di harapkan kedepannya dapat mengurangi aktifitas masyarakat yang kurang produktif menjadi produktif pemerintah berusaha memberikan arahan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, berikut media komunikasi untuk mempublikasikan setiap kegiatan yang berlangsung dan sarana menyampaikan keluhan ke pada pemerintah :

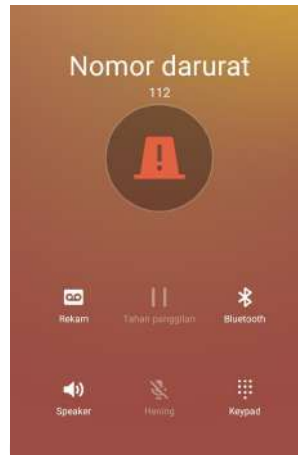
1) Website Dinas Sosial



2) Menggunakan WhatsApp



3) Layanan 112 Kominfo



b. Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Datangnya wabah pandemi Covid 19 ke Indonesia pada tahun lalu memberikan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali yang terjadi di Kota Tebing Tinggi mengakibatkan banyaknya aktifitas yang terhenti. Akibat dari pandemi Covid 19 ini berpengaruh pada bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pada bidang ekonomi, harga barang bahan pokok mulai melambung tinggi. Beberapa masyarakat menganggap pembagian bantuan sosial ini ada yang tidak merata, sehingga Kepala Dinas Sosial sulit dalam menangani mindset masyarakat.

“masyarakat yang beranggapan seperti itu pasti ada. Kadang kan ada yang tidak kebagian. Kendalanya APBN dan APBD tidak mencukupi untuk belanja, itulah sebabnya kenapa masyarakat itu merasa tidak merata, kami pun kualahan dalam memberikan. Karena uang yang dikucurkan pemerintah untuk menangani covid ini. Oleh sebab itu Dinas Sosial Memiliki program tersendiri di mana penerima program yang di salurkan oleh Dinas tidak terdaftar di bantuan sosial mana pun untuk menghimbau terjadinya penurunan atas harapan untuk mendongrak perekonomian masyarakat yang terdampak covid 19 sebelum nya”
Ujar pak Suhendri Suar, Spd

Dinas berupaya penuh agar masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan baik namun semua juga tergantung pada data yang terdaftar di DTKS, BDT dan BPNT, kesimpulan di atas membuat Dinas Sosil tidak hanya berfokus pada bantuan

yang sudah ada dari Kementrian RI yang berupa PKH dan bantuan lainnya terdapat program bantuan yang merupakan progja dari Dinas Sosial sendiri berupa bantuan Permakanan, Beras Madani dan Rehabilitas (Berupa Alat Bantu) penjelelasan sebagai berikut :

a. PKH

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengann amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk mempunyai aksesdan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Jadi dalam PKH ini difokuskan pada bagaimana menurunkan kemiskinan di masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan. Seperti yang disampaikan Bu Julia Sebagai Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi:

“PKH merupakan salah satu diantara berbagai program pengentasan kemiskinan yang kami jalankan mbak. Namun ada sedikit yang berbeda dari PKH ini, karena PKH adalah bantuan yang bersyarat. Mengapa saya katakan bersyarat? Karena KPM atau biasa disebut sebagai penerima bansos PKH ini harus memiliki salah satu komponen diantaranya ada ibu hamil, balita, anak SD hingga SMA sederajat, lansia, dan disabilitas. Tujuan dari adanya PKH ini juga agar generasi yang akan datang itu bisa berubah menjadi lebih baik, jadi mereka diwajibkan datang ke layanan kesehatan dan pendidikan. Karena kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Orang miskin karena dia tidak berpendidikan, atau dia tidak berpendidikan karena termasuk orang miskin. Makanya pemerintah melalui PKH ini diharapkan agar generasi selanjutnya bisa memiliki kehidupan yang lebih layak. Mekanya di PKH itu ada

motto bahwa “saya miskin tapi anak saya tidak boleh miskin”. “ (Hasil wawancara dengan Bu Julia Sebagai Koordinator PKH pada hari Selasa 26 Juli 2022 Pukul 11. 41 WIB)

Harapan dari PKH ini adalah supaya KPM itu ada perubahan pola pikir bahwa pendidikan itu penting kesehatan juga penting. Sehingga tujuan pemerintah melalui bansos PKH ini adalah agar dapat memutus rantai kemiskinan atau kemiskinan turun-temurun.

Strategi Komunikasi Dinas Sosial Tebing Tinggi Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat Miskin Di Kota Tebing Tinggi Melalui PKH

1. Pengenalan Khalayak

Mengenali khalayak merupakan bagian langkah pertama yang harus dilakukan oleh komunikator dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa komunikasi atau khalayak itu sebenarnya tidak hanya bersikap pasif namun juga harus aktif agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif karena antara komunikator dengan komunikasi bukan hanya terjadi sebuah hubungan namun juga dapat saling mempengaruhi. Perlu diketahui bahwa dalam implementasi PKH yang menjadi komunikator adalah Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Tim koordinator Kabupaten Pelaksana PKH dan juga pendamping yang semua merupakan di bawah kendali Dinas Sosial Tebing Tinggi. Sedangkan komunikannya adalah Penerima Bantuan Sosial PKH. Dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin melalui PKH ini Dinas Sosial menggunakan program P2K2 (Pertemuan Peningkatan Keluarga) sebagai bentuk pembinaan kepada para KPM PKH agar kelak bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan juga ada program Graduasi sebagai sarana untuk meminimalisir masalah penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran. Strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial Tebing Tinggi dalam mengenali khalayaknya adalah dengan cara melihat berdasarkan kerangka referensi KPM PKH yang mana pada dasarnya yang menjadi khalayak adalah para ibu rumah tangga yang notabennya Kabupaten Ngawi sendiri merupakan salah satu Kota yang mayoritas masyarakatnya merupakan pedagang dan buruh yang memiliki latar pendidikan yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Mas Iqbal sebagai salah satu pendamping:

“jadi PKH ini bantuannya disalurkan melalui ibu-ibu mbak, jadi ya saat pertemuan gitu semua anggotanya ibu-ibu. Setiap masing-masing KPM kan memiliki tingkat pengalaman maupun pendidikan yang berbeda sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Dan setiap daerah yang saya dampingi itu kan tipekal masyarakatnya dalam memahami sesuatu itu pun juga berbeda. Maka dari itu agar saya bisa menyampaikan informasi dan bisa diterima dipahami oleh kelompok KPM PKH yang sedang saya dampingi, saya meminta bantuan salah satu anggota PKH yang telah ditunjuk sebagai ketua kelompok mereka untuk mengetahui bagaimana karakteristik para KPM yang sedang saya dampingi sehingga pesan yang saya berikan bisa dengan mudah mereka pahami. Begitu pula saat mengedukasi KPM untuk kesadaran diri mengundurkan diri dari PKH jika sudah mampu.” (Hasil wawancara dengan Mas Iqbal pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 09.39 – 22.38 WIB)

Jadi pengenalan khalayak dilakukan dengan melihat masing-masing wilayah dampingan, karena antara Kelurahan satu dengan yang lain, bahkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga dalam penyampaian pesan pun nanti juga akan menggunakan metode yang berbeda. Selain itu ketika seorang komunikator ingin menyampaikan pesan juga harus memperhatikan situasi kondisi dari khalayak. Dalam hal ini Dinas sosial dalam menentukan sebuah kebijakan atau akan membuat informasi baru untuk para KPM, mereka melihat kondisi umum yang sedang terjadi di masyarakat. Sehingga Dinas Sosial dapat membuat kebijakan yang sekiranya tidak memberatkan untuk para KPM PKH. Demikian pula dengan pendamping selaku tangan panjang dari Dinas Sosial Tebing Tinggi yang melaksanakan program di lapangan, dalam melaksanakan kegiatan misalkan pendampingan ataupun P2K2 juga mempertimbangkan situasi kondisi dari khalayaknya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Iqbal:

“sebelum mengadakan pertemuan biasanya kami melihat kondisi dari KPM apakah sedang masa-masa repot. Karena rata-rata disini kan petani jadi kalau pas musim tanam atau panen gitu kan pasti banyak yang repot, jadi kita ngambil waktu yang sekiranya paling longgar. Selain kondisi kita juga mempertimbangkan situasi saat kegiatan berlangsung. Saat kami

menyampaikan sebuah informasi ataupun materi saat melakukan pembinaan kepada para KPM biasanya kalau ibu-ibu kan suka ngrumpi ya mbak, jadi kadang sering kali pertemuan jadi rame. Nah pada saat yang tidak kondusif seperti itu kami diam sejenak di tengah-tengah kegiatan sampai ibu-ibu anteng kembali. Karena biasanya mereka akan merasa pekewuh sendiri. Kemudian setelah semua bisa kondusif baru kegiatan dilanjutkan. Sehingga apa yang kami sampaikan bisa didengar dan dipahami. Sedangkan untuk edukasi agar KPM yang sekiranya sudah mampu mau melakukan graduasi mandiri biasanya kami juga melihat-lihat apakah saat itu kondisi psikis KPM dalam keadaan stabil atau tidak agar sat kita menyampaikan pemahaman bisa diterima tanpa menyinggung.” (Hasil wawancara dengan Mas Iqbal, pada hari Selasa 09 Agustus 2022 pukul 09.39 – 22.38 WIB)

Klasifikasi khalayak Dinas Sosial Tebing Tinggi dalam penyaluran PKH ini adalah para Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antar masing-masing KPM. Namun dalam mengawasi jalannya PKH ini agar bisa terealisasi dengan baik biasanya Dinas Sosial melalui pendamping harus mempunyai target yang sekiranya KPM tersebut sudah tidak layak menerima Bansos. Sehingga KPM yang sekiranya dipandang sudah tidak layak menerima Bansos maka pendamping akan lebih fokus pada mereka dan lebih mendalam lagi dalam memberi pemahaman kepada mereka agar mau mengundurkan diri. Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum menyampaikan pesan, pendamping harus mengetahui situasi dan kondisi dari KPM PKH apakah mereka dalam keadaan stabil dan nyaman untuk menerima pesan dari komunikator.

2. Penyusunan Pesan

Langkah selanjutnya dalam strategi komunikasi adalah penyusunan pesan. Dinas Sosial Tebing Tinggi harus menetapkan apa saja yang akan disampaikan kepada khalayak dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin khususnya di Ngawi. Sesuai dengan formula Laswell mengenai rumus *what?* dalam hal ini Dinas Sosial Tebing Tinggi telah menyusun pesan beberapa diantaranya tentang informasi kebijakan PKH, informasi pencairan PKH, memberi materi kepada KPM berupa pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, pendidikan, manajemen

keuangan/ekonomi, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan disabilitas yang mana semua materi tersebut telah dijadikan sebuah modul untuk kegiatan P2K2.

3. Menetapkan Metode Setelah mengenali khalayak dan menyusun pesan sedemikian rupa, maka tahap selanjutnya dalam strategi komunikasi adalah dengan menentukan metode penyampaian pesan yang sesuai dengan isi pesan yang akan disampaikan dan juga memperhatikan situasi dan kondisi dari komunikannya. Dalam hal ini Dinas Sosial menyampaikan pesan jika itu mengenai informasi kebijakan maka cara menyampaikan pesannya dengan metode informatif yakni dengan menginformasikan kebijakan kepada para anggota KPM dan juga dengan redundancy yakni dengan mengulang-ulang berita atau kabar yang disampaikan kepada para KPM PKH. Mengapa menggunakan redundancy juga? Hal ini dikarenakan untuk menghindari kemungkinan komunikasi tidak mendengar informasi yang disampaikan ataupun kemungkinan komunikasi kurang paham dengan informasi yang disampaikan Dinas Sosial baik oleh Kasi Jaminan Sosial dan Keluarga maupun Tim Koordinasi PKH Kabupaten juga para pendamping. Selain itu Dinas Sosial melalui Pendamping juga menggunakan metode edukatif dalam menyampaikan pesan jika itu berkaitan dengan materi peningkatan kemampuan keluarga yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada para KPM PKH bagaimana cara pola asuh anak, kesehatan, cara manajemen keuangan, pengetahuan tentang kesejahteraan lansia dan disabilitas yang mana materi tersebut juga telah menjadi modul pembelajaran.
4. Pemilihan Media Komunikasi Media komunikasi merupakan sarana yang dapat mempermudah seorang komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan. Oleh karena itu pemilihan media komunikasi yang tepat sangatlah penting. Dalam hal ini Dinas Sosial menggunakan media komunikasi Whatsapp sebagai alat penghubung antara Koordinator (Pendamping) dengan masyarakat.



Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi mempunyai pendamping dalam pelaksanaan program graduasi mandiri dalam menyampaikan pesan berupa materi penyadaran diri bagi kelompok penerima PKH yang sudah mampu juga menggunakan metode edukatif disertai dengan persuasif. seperti yang dikatakan Bu Juli pada halaman sebelumnya seperti berikut ini:

“Setiap pendamping itu kan ada tugas mengedukasi kelompoknya mulai dari pendidikan anak, pola asuh anak, manajemen keuangan, juga termasuk penyadaran untuk bisa mandiri. Sebenarnya program bantuan PKH ini kan outputnya kalau mereka sudah bisa lulus sudah tidak menggantungkan diri dengan bantuan sosial. Edukasi biasanya kita laksanakan setiap bulan sekali per kelompok. Tapi kesulitannya ya namanya manusia ketika diberi bantuan itu pasti egonya kan berat, yang susah itu di penedarannya. Maka dari itu ada metode lain yakni selain pendamping mengedukasi juga mereka dapat melibatkan perangkat desa seperti dengan bu lurah. Kita kan sudah punya planning dalam arti kita sudah punya sasaran siapa saja yang akan kita keluarkan dari anggota kpm pkh sendiri punya dampingan memiliki 6495 orang kpm pkh 300 lebih kelompok pkh dan 17 pendamping, Saya kan sudah punya target oh si A si B itu kelihatannya sudah layak untuk digraduasi (diberhentikan), nah kita fokus pada target tersebut dengan memberinya edukasi yang lebih mendalam. Ketika itu kita mendatangkan perangkat kelurahan misalkan Bu lurah itu biasanya kan akan membuat mereka akhirnya dengan suka rela mau mengundurkan diri dari PKH.” (Hasil wawancara dengan Bu Julia Sebagai Koordinator PKH hari Selasa 26 Juli 2022 Pukul 11. 41 WIB).

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pendamping selain mengedukasi KPM mereka juga menerapkan metode Persuasive dengan adanya 34 pihak kelurahan sehingga dengan kehadiran salah satu Perangkat Desa akan membuat KPM PKH merasa terbujuk secara halus. Sebenarnya dalam pelaksanaan PKH pihak Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi sudah sangat berhati-hati dalam menyalurkan PKH, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa dari sekian ribu calon penerima PKH ada yang lolos dari pengawasan pihak Dinas Sosial. Kehati-hatian Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi ini bisa kita lihat dari cara mereka melakukan penyeleksian dengan bersinergi bersama pemerintah kelurahan saat filtering data seperti keterangan dari Bu Julia sebagai berikut:

“Setiap data bantuan sosial apapun itu diambil dari DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) yang dulunya disebut BDT. Jadi awal penentuan kpm pkh itu juga diambil dari situ. PKH itu kan ada pendamping ya, nah itu ya kepanjangan tangan dari dinas sosial. fungsi Kontrol sebenarnya ada pada mereka. Misalkan ini ada permasalahan ada calon penerima meskipun dia itu diambil dari data DTKS tadi, kita masih ada filter lagi berupa verifikasi dan validasi nanti kita datangi, biasanya sih kita koordinasi dengan pihak pemerintah Kelurahan. Jadi misalkan di desa babadan ada 100 calon penerima nah datanya itu diberikan pada pemerintah kelurahan, jadi filter awal ada di kelurahan, perangkat desa akan menyaring mana calon penerima yang sekiranya sudah mampu jadi sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Setelah dicoreti oleh perangkat mana saja yang sudah mampu, kita pun juga tidak serta merta kita eksekusi, jadi kita masih mengadakan survei langsung. Biasanya yang kita jadikan parameter itu dua mbak, yakni dari perangkat kelurahan dan ketua kelompok. Jadi setiap pendamping itu membawahi beberapa kelompok, dan setiap masing-masing kelompok memiliki ketua kelompok yang bertugas membantu kerja pendamping.” hari Selasa 26 Juli 2022 Pukul 11. 41 WIB).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dimengerti bahwa kesuksesan pelaksanaan PKH ini tidak akan terlepas dari adanya kerjasama antara Pendamping dan pihak pemerintah Kelurahan. Sehingga dalam mengatasi masalah tersebut Dinas Sosial telah menjalankan beberapa program penanganan masalah yakni melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan

Kemampuan Keluarga (P2K2) dan graduasi mandiri. Seperti yang disampaikan oleh Bu Julia seperti berikut:

“yaa kita juga tidak hanya diam, karena Pemerintah juga mengatur kebijakan adanya program resertifikasi dan graduasi mandiri. Resertifikasi itu seperti pendataan ulang. Jadi teman-teman pendamping itu kita sebar di seluruh kecamatan dengan sistem silang, misalnya pendamping Pinang Mancung melakukan resertifikasi di kecamatan Bajenis, jadi intinya para pendamping tidak mensertifikasi di wilayah yang mereka dampingi sehingga unsur objektivitas bisa berjalan. Dalam resertifikasi terdapat pendataan terkait pendapatan berapa, keadaan rumahnya bagaimana, asetnya apa saja, dll. Dengan adanya data tersebut akan ditentukan siapa saja yang akan kita eliminasi dari kpm pkh. Sedangkan untuk graduasi mandiri, kita mengintruksikan kepada para pendamping agar dapat mengedukasi para kpm pkh bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sehingga yang dirasa sudah mampu agar memberikan kepada saudara lain yang lebih membutuhkan. Saat kebijakan ini kami jalankan ternyata banyak sekali yang tergraduasi baik secara mandiri maupun resertifikasi. Jadi bisa dikatakan cukup efektif untuk dijadikan metode penyelesaian kasalahan sasaran.”

Berdasarkan penjelasan Bu Julia di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial melalui pendamping melakukan sosialisasi atau mengedukasi para penerima PKH mengenai kesadaran diri bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.

Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Artinya :

Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah

adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.

Diriwayatkan oleh *Imam al-Bukhari (no. 1427) dan Muslim no.1053* Maksudnya adalah bahwa seseorang yang bisa memberi sesuatu kepada orang lain itu lebih utama dari pada seseorang yang mengharap pemberian orang lain seakan *mengemis* kepada orang lain. Kemudian peneliti juga mendapat informasi lain dari informan lain, dalam upaya meminimalisir permasalahan PKH di kalangan KPM PKH Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi juga melakukan kegiatan monitoring, seperti yang dijelaskan oleh Bu Cut Alia Novianda selaku salah satu pendamping di Lubuk Raya Sebagai Berikut:

“Dinas memiliki Koordinator di setiap program untuk melakukan monitoring (pemantauan) ke lapangan itu dilakukan setiap satu minggu sekali oleh Koordinator kepada setiap pendamping kelompok KPM PKH. Koordinator turun kelapangan menemui satu pendamping di setiap kecamatan, dan dalam waktu satu jam pertemuan dan koordinator akan berpindah ke Kecamatan lain karena jumlah nya banyak dan jadwal sering bertabrakan. Namun saat melakukan monitoring ini Dinas Sosial Selalu memberikan informasi pada pendamping apa bila ingin mengunjungi tempat berlangsungnya mentoring antara pendamping dan PKM PKH, jadi melakukan sidak langsung dengan kode. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui kondisi langsung KPM di lapangan apakah program berjalan dengan baik atautkah ada masalah di bawah”.

Melalui data tersebut kita dapat mengetahui bahwa Dinas Sosial telah mengupayakan banyak hal agar program Bantuan Sosial PKH dapat diminimalisir permasalahannya baik dari segi masalah teknis maupun penyalurannya, sehingga mampu membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dari belenggu kemiskinan khususnya yang ada di wilayah Kota Tebing Tinggi. Monitoring dilakukan sebagai bentuk pengawasan sejauh mana program PKH dilaksanakan. Sehingga monitoring ini merupakan bagian dari kegiatan evaluasi operasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Jadi sebenarnya monitoring ini dilakukan

sebagai salah satu proses yang harus dilakukan untuk kelancaran program graduasi mandiri. Penjelasan Bu Cut tersebut telah menuturkan juga bahwa untuk membuat para KPM bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan sosial lagi di masa mendatang, selain edukasi tentang penyadaran diri untuk KPM yang sudah mampu agar mengundurkan diri Dinas Sosial juga memberikan bekal melalui pembinaan kepada para KPM PKH melalui pendamping. Kegiatan ini disebut dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

JUMLAH PENERIMA PKH

Tabel 4.3. Jumlah keseluruhan masyarakat yang mendapat bantuan KPM

No	Tahun	Jumlah	Tahap
1.	2021	4844 Jiwa	Satu (Januari)
		6096 Jiwa	Dua (April)
		5970 Jiwa	Tiga (Agustus)
		6218 Jiwa	Empat (November)
2.	2022	6605 Jiwa	Satu (Januari)
		6495 Jiwa	Dua (April)
		Berjalan	Tiga (Agustus)
		Berjalan	Empat

b. Bantuan Permakanan

Pada umumnya pelaksanaan penyaluran bansos bantuan permakan tidak jauh beda dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat perbedaan di mana bantuan permakan ini hanya berupa bantuan yang berisikan makanna pokok pada umumnya berupa 5 kg beras, 1 kg telur, 1 L minyak makan dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bantuan permakan ini meliputi katgotri yaitu lansia, Terlantar, Disabilitas.

“Bantuan ini diberikan dengan harapan bisa meringankan beban keluarga, dan bisa memberikan semangat agar keluarga yang memiliki keluarga yang mengalami kelusitan berupa disabilitas dan lansia diberi kesabaran dalam mengurus” Ujar kak Angnes Manurung S.sos Sebagai Pekerja Sosial.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berusaha untuk memberikan solusi terbaik agar masyarakat tidak kecewa atas kinerja pemerintah, sejumlah fasilitas yang memadai yaitu berupa berbagai macam bantuan di turunkan. Tidak semua masyarakat mendapat bantuan namun bantuan selalu di berikan di harapkan bagi warga yang sudah cukup mampu dapat bergantian dengan warga yang lain, terus melakukan sosialisasi rutin dan pengawasan agar bantuan dapat tepat sasaran.

JUMLAH PENERIMA BANTUAN PERMAKANAN

Tabel 4.4. Jumlah keseluruhan masyarakat yang mendapat bantuan permakanan

No	Kata Gori	Survei	Jumlah Penerima
1.	Terlantar	Keadaan Rumah	15
	Lansia	Status	15
	Disabilitas	Kartu Keluarga	15
Pada Tahun 2021- 2022			
2.	Terlantar	Keadaan Rumah	15
	Lansia	Status	15
	Disabilitas	Kartu Keluarga	15

c. Beras Madani

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan beras madani seberat 10 kg kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PKM) sebanyak 1126 kepada keluarga untuk sekota tebing tinggi. Bantuan beras madani yang di terima masyarakat di luar data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berdasarkan data terpadu DTKS. Bantuan tersebut di salurka kepada 35 kelurahan di Kota Tebing Tinggi.

“Ini merupakan bantuan yang di lakukan oleh Dinas Sosial setiap tahunnya dan akan di salurka ke setiap kelurahan secara bergilir” ujar Kadis Kota Tebing Tinggi Drs. Khairil Anwar M.Si.

Bantuan berupa beras madani ini di peruntukan bagi warga miskin yang terdaftar di DTKS, Sedang tidak menerima PKH dan BPNT dalam menerima bantuan setiap bulannya dari program tersebut. Penerima bantuan bisa mengambil beras tersebut di kelurahan dengan membawa kartu keluarga dan kartu yang telah dibuat Dinas Sosial untuk mejaaga adanya penerima bantuan ganda dan teraturnya dalam mengambil bantuan di kelurahannya masing-masing.

“Kami sangat berharap dengan adanya beras madani ini dapat bermanfaat dan dapat menanggulangi masyarakat yang tidak terdaftar di PKH, BPNT dan lain sebagainya di Kota Tebing Tinggi yang di sebabkan faktor ekonomi” Ujar Ibu Fatmawati seabagi Penyuluh Sosial

Dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat senang karena pemerintah menemukan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat, pemerintah mampu menjaminkan kepada masyarakat sebuah program bantuan di luar bantuan Nasional dan masih termasuk dalam data dana APBN/APBD Kota Tebing Tinggi

JUMLAH PENERIMA BERAS MADANI

Tabel 4.5. Jumlah keseluruhan masyarakat yang mendapat bantuan Beras madani

No	Tahun	Jumlah	Tahap
1.	2021	1331	April
			Juni
			Agustus
			Desember
2.	2022	1126	Januari
			April
			Masih Proses

d. Penyuluh Sosial/Rehabilitas

Sesuai dengan data Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Tebing Tinggi 2022, terdapat sejumlah masyarakat yang menyandang disabilitas. Semua penyandang disabilitas memiliki tingkat keterbatasan yang berbeda (fisik, intelektual, mental, sensorik dan ganda) seperti yang di ketahui penyandang disabilitas kebanyakan dihadapkan oleh ekonomi yang begitu sulit di mana harga pangan naik begitu tinggi sehingga tidak berpikiran untuk melakukan pengobatan dengan maksimal.

“Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga berkomitmen untuk memperhatikan pemenuhan stiap hak disabilitas, hal ini di buktikan dengan adanya memberikan perhatian berupa bantuan alat bantu berupa kursi roda, tongkat, alat bantu dengar semua sesuai dengan jumlah dana APBD sehingga bantuan setiap tahun nya itu bisa berbeda dan memiliki batasan penerima. Sebelum melakukan penyaluran seperti biasanya terdapat survei lapangan oleh pihak Dinas Sosial yang di bantu oleh Kelurahan dengan melampirkan foto penyandang disabilitas serta kondisi ekonomi juga ikut di pantau, sehingga bantuan yang di salurkan dapat tepat sasaran terhadap masyarakat yang benar membutuhkan”. Ujar Ibu Agustiningsih sebagai penyuluh sosial

Dari kesimpulan di atas bahwa Pemerintah kota tebing tinggi dengan sigap memberikan bantuan sesuai dengan arahan dan himabauan dari Kementrian, meski pun bantuan rehabilitas tersebut tidak sebagai bantuan Nasional. Bantuan rehabilitas dalam pemerian dan penerimaan di lakukan di pelataran Kantor Dinas Sosial di saksikan oleh semua jajaran petugas, karena bantuan ini di adakan satu tahun sekali sehingga ada hal yang berbeda dari bantuan lainnya.

No	Penerima	Alat Bantu
1.	15 Jiwa (2021)	Tongkat
		Kursi Roda
2.	15 Jiwa (2022)	Kursi Roda
		Alat Bantu Dengar

Tabel 4.6. Jumlah keseluruhan masyarakat yang mendapat penyuluhan sosial